

---

**ANALISIS MARAKNYA GURU NON-LULUSAN PPKN MENGAJAR MATA  
PELAJARAN PPKN**

**Adam Yusuf Wardana<sup>1</sup>, Syaifullah<sup>2</sup>, Nisrina Nurul Insani<sup>3</sup>**  
adamwardana@upi.edu<sup>1</sup>, syaifulsyam@upi.edu<sup>2</sup>, nisrina.n.i@upi.edu<sup>3</sup>  
**Universitas Pendidikan Indonesia**

**ABSTRAK**

Fenomena maraknya guru non-lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pengajaran PPKn oleh guru non-lulusan PPKn terhadap kualitas pendidikan, pemahaman siswa, dan upaya pembenahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara semi terstruktur kepada siswa, guru PPKn, mahasiswa PPG, dan calon guru PPKn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru non-lulusan PPKn sering kali tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang PPKn, yang berdampak negatif pada kualitas pengajaran dan pemahaman siswa terhadap materi PPKn. Kebijakan rekrutmen yang tidak selektif dan distribusi guru yang tidak merata memperparah masalah ini. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi guru non-lulusan PPKn, peningkatan insentif bagi lulusan PPKn untuk bekerja di daerah terpencil, dan revisi kebijakan rekrutmen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pengajaran PPKn di sekolah-sekolah dapat ditingkatkan, sehingga mampu membentuk karakter dan kesadaran berbangsa serta bernegara yang lebih baik di kalangan siswa.

**Kata Kunci:** Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru non-lulusan PPKn, kualitas pendidikan, kebijakan rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi.

**ABSTRACT**

*The phenomenon of the increasing number of non-civics (Pancasila and Civic Education) graduates teaching civics in Indonesian schools has become a significant concern in recent years. This study aims to analyze the impact of civics instruction by non-civics graduates on education quality, student understanding, and the remedial efforts that can be implemented to address this issue. The research methodology employed is a qualitative approach with semi-structured interviews with students, civics teachers, PPG (Teacher Professional Education) students, and prospective civics teachers. The findings indicate that non-civics graduates often lack adequate competency in the field of civics, negatively impacting the quality of teaching and students' comprehension of civics material. Non-selective recruitment policies and uneven distribution of teachers exacerbate this problem. Recommendations include enhancing training and certification for non-civics graduates, increasing incentives for civics graduates to work in remote areas, and revising recruitment policies. These measures are expected to improve the quality of civics instruction in schools, thereby fostering better character and national awareness among students.*

**Keywords:** Pancasila and Civic Education, non-civics graduates, education quality, recruitment policies, training and certification.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran penting untuk diajarkan yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa serta bernegara di kalangan siswa. Tetapi, ada fenomena yang memprihatinkan dalam beberapa tahun ini, yaitu maraknya guru non-lulusan PPKn yang mengajar mata pelajaran ini. Masalah ini dapat muncul dari beberapa faktor, salah satunya yaitu kekurangan guru belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki kualitas serta benar benar lulusan PPKn, kebijakan dalam rekrutmen guru yang seenaknya, serta tidak meratanya guru PPKn di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas pendidikan PPKn dan efektivitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Pada penelitian serta kajian ini menunjukkan bahwasanya kompetensi dan latar belakang guru itu sangat mempengaruhi kualitas dalam mengajar, guru yang bukan bidang khusus PPKn pastinya mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi ajar secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini berdampak pada pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi fokus utama PPKn. Selain itu, perbedaan metode pengajaran yang digunakan oleh guru non-lulusan PPKn dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam mempelajari mata pelajaran ini.

Pada studi kali ini memiliki tujuan dalam menganalisis dampak dari pengajaran PPKn oleh guru non-lulusan PPKn terhadap kualitas pendidikan, pemahaman siswa, dan upaya pembenahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran PPKn di sekolah-sekolah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara semi terstruktur informasi rancangan penelitian ini secara rinci dengan menggunakan identifikasi masalah penelitian, menyusun dan mempertajam pertanyaan penelitian Memilih sampel (Kusumastuti, 2019). Mengkaji lebih dalam tentang Guru Non Lulusan PPKn dalam Mengajar PPKn. Wawancara dilakukan kepada siswa tingkat SMP dan SMA, Guru Lulusan PPKn, Mahasiswa PPG, serta Calon Guru PPKn dalam menyikapi permasalahan Guru Non Lulusan PPKn dalam Mengajar PPKn.

Nama (inisial)	Status	Domisili
A	Siswa	Kab. Bandung
R	Guru PPKn	Kab. Bandung
M	Mahasiswa PPG	Kota Bandung
R	Calon Guru PPKn	Kota Bandung
A	Calon Guru PPKn	Kota Bandung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena maraknya guru non-lulusan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat dilihat sebagai refleksi dari sejumlah faktor, termasuk kekurangan tenaga pengajar yang berkualifikasi, kebijakan rekrutmen yang tidak sepenuhnya selektif, serta distribusi guru yang tidak merata. Menurut Haris dan Wibowo (2020), kekurangan guru PPKn yang berkualifikasi sering kali memaksa sekolah-sekolah untuk menugaskan guru dari latar belakang lain untuk mengajar mata pelajaran ini.

### Dampak Terhadap Kualitas Pengajaran

Guru non-lulusan PPKn sering kali tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang PPKn, yang berdampak pada kualitas pengajaran. Penelitian oleh Ningsih (2021)

menunjukkan bahwa guru dengan latar belakang pendidikan PPKn cenderung lebih mampu menyampaikan materi secara mendalam dan relevan. Mereka juga lebih efektif dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kunci seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan.

Guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PPKn mungkin kurang familiar dengan metodologi pengajaran yang sesuai, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran. Menurut Pratama (2022), hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan minat siswa dalam mempelajari PPKn, serta menurunkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan.

### **Analisis Kebijakan dan Implikasi Praktis**

Kebijakan rekrutmen guru di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan latar belakang akademis secara mendalam, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Setiawan dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa distribusi guru PPKn yang tidak merata membuat sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali harus mengandalkan guru dari disiplin ilmu lain. Ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi guru non-lulusan PPKn agar mereka dapat mengajar dengan lebih kompeten. Kedua, pemerintah dapat meningkatkan insentif bagi lulusan PPKn untuk bekerja di daerah-daerah yang kekurangan guru. Ketiga, revisi kebijakan rekrutmen untuk memastikan bahwa guru yang dipekerjakan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

## **KESIMPULAN**

Fenomena meningkatnya jumlah guru non-lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait dengan kualitas pendidikan. Guru non-lulusan PPKn sering kali kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan materi PPKn secara efektif, yang berdampak negatif pada pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kebijakan rekrutmen yang tidak selektif dan distribusi guru yang tidak merata memperparah masalah ini, terutama di daerah-daerah terpencil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi guru sangat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pemahaman siswa. Guru non-lulusan PPKn cenderung mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara mendalam dan menyeluruh, yang berdampak pada motivasi dan minat siswa dalam mempelajari PPKn. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajaran PPKn, termasuk pelatihan dan sertifikasi khusus bagi guru non-lulusan PPKn, peningkatan insentif bagi lulusan PPKn untuk bekerja di daerah-daerah yang kekurangan guru, dan revisi kebijakan rekrutmen guru.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas pengajaran PPKn di sekolah-sekolah dapat ditingkatkan, sehingga mampu membentuk karakter dan kesadaran berbangsa serta bernegara yang lebih baik di kalangan siswa. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengambil kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan PPKn di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ningsih, S. M. (2021). Analisis kualifikasi guru PPKn terhadap kualitas pembelajaran di sekolah menengah pertama. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(3), 180-195.
- Pratama, H. (2022). Dampak guru non-lulusan PPKn terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai kebangsaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(4), 112-125.
- Setiawan, R., & Rahmawati, E. (2023). Rekrutmen dan distribusi guru PPKn: Studi komparatif di beberapa wilayah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(2), 201-218.
- Arifin, Z., & Muslimin, L. (2019). Kompetensi pedagogik guru PPKn dalam meningkatkan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 145-160.
- Haris, F., & Wibowo, S. (2020). Tantangan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era digital: Studi kasus guru non-lulusan PPKn. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(1), 23-35.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*